

**PEMERINTAH
KOTA DUMAI**



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

**2021
LKJ - IP
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN PUTRI TUJUH NO. 04
KEL. TELUK BINJAI KEC. DUMAI TIMUR
KOTA DUMAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021. LKj-IP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006– 2021 Kota Dumai. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai tahun 2021 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan,

oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Dumai, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA DUMAI



Drs. H. KHAILIL ADLI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700511 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
B. ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	8
B. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	28

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai telah menyusun sebuah laporan guna mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program dan kegiatan tersebut beserta capaiannya bertujuan untuk :

1. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas sekaligus peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai sendiri;
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas yang diemban dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi setiap program dan kegiatan-kegiatan Dinas;
3. Menciptakan self-assessment (penilaian diri) yang diharapkan akan memberikan koreksi, perbaikan dan dorongan (feed back) untuk kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai adalah sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya yang telah dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Dumai;
2. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, untuk kemudian diharapkan dapat memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai di masa yang akan datang.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Asset;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

2. Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Interoperabilitas, dan;
3. Seksi Interkoneksi dan Jaringan TIK;
- e. Bidang Layanan Aplikasi E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government;
 2. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK; dan
 3. Seksi Tata Kelola E-Government;
- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral;
 2. Seksi Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
 3. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai adalah suatu kondisi aktual, yang merupakan sesuatu hal yang menjadi target perubahan yang akan dicapai.

Dalam Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebagai Tupoksi Dinas saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi, khususnya yang menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala Daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan pembangunan e- Government. Tantangan utama **“pengembangan e-Government”** adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Infrastruktur komunikasi data dan informasi infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan, pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Dumai Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021
1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Kategori e-government Kota Dumai	Indeks	2,81
		Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	36
		Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7
		Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	persen	100

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2021 dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja Komunikasi Dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021 tersaji dalam Lampiran-1.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp, 11.942.916.732,- yang digunakan untuk melaksanakan 5 program sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Dumai Tahun 2021

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.662.391.009
2	Informasi dan Komunikasi Publik	2.611.850.831
3	Aplikasi Informatika	3.453.456.947
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	136.816.449
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	78.016.981

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam penjabaran akuntabilitas, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2021 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

Untuk mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pencapaian indikator sasaran tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 -2021, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI S/D SEMESTER 1 TAHUN 2021	CAPAIAN (%)
Kategori e-government Kota Dumai	Indeks	2,81	2.56	91
Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	36	36	100
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7	7	100
Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	100	100	100

Capaian dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran diatas karena didukung dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

1. Kategori e-government Kota Dumai

Target dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah memperoleh nilai indeks e-government sebesar 2,81 dengan realisasi 2,56 atau capaian sebesar 91%, bedasarkan Hasil perolehan nilai indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, namun indeks 2,56 tersebut mendapatkan predikat “**cukup**”. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan Adapun Prediket Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini :

Tabel. 2 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi Pusat/Daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil perolehan nilai indeks SPBE berdasarkan SK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kota Dumai Tahun 2021 sebagai berikut :

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Riau	2,55	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Kampar	1,67	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	1,77	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Pelalawan	1,38	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	1,78	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Siak	1,90	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	2,96	Baik
8.	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	1,19	Kurang
No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
9.	Pemerintah Kota Pekanbaru	2,17	Cukup
10.	Pemerintah Kota Dumai	2,56	Cukup

Berdasarkan hasil perolehan nilai tersebut diatas, masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera di evaluasi dan dibenahi, seperti domain tata kelola SPBE pada perencanaan strategis SPBE Kota Dumai. Terlepas dari itu semua itu, target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

2. Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 36 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi ke jaringan internet dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sebanyak 36 OPD atau sebesar 100 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan pada tahun 2021. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Aplikasi Informatika..

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ini merupakan sub kegiatan yang menyediakan koneksi jaringan internet kepada OPD serta melakukan pembinaan dan pengembangan dalam hal pengelolaan jaringan internet. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. dengan target 36 OPD terealisasi sebanyak 36 OPD diluar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai

Tabel Alokasi Bandwith Internet Tahun 2021

No	UNIT / OPD	Jumlah	Ruangan		Alokasi Bw		Type
					Domestik	Internasional	
1	BAPEDA	1	1	Ruang Server	50	20	Share / Up to
2	BKPSDM (BKD)	2	1	Ruang Bendahara	20	10	Share / Up to
			2	Ruang Server	20	10	Share / Up to
3	BPKAD	3	1	Bidang Anggaran Ruang Server Lt 1	30	10	Share / Up to

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 2021

			2	Sekretariat Lt 1	20	10	Share / Up to
			3	Bidang Aset Lt 2	20	10	Share / Up to
4	DINAS KESEHATAN	1	1	Ruang Sekretariat	30	10	Share / Up to
5	DPRD	6	1	Ruang Bendahara	20	10	Share / Up to
			2	Ruang Sekretariat	20	10	Share / Up to
			3	Ruang fraksi 1	20	10	Share / Up to
			4	Ruang fraksi 2	20	10	Share / Up to
			5	Ruang fraksi 3	20	10	Share / Up to
			6	Ruang fraksi 4	20	10	Share / Up to
6	INSPEKTORAT	2	1	Ruang Bendahara LT 1	20	10	Share / Up to
			2	Ruang IRBAN LT 2	20	10	Share / Up to
7	SETDA	1	1	Bagian Keuangan Lt 1	30	10	Share / Up to
			2	Bagian Pemerintahan Lt 2	20	10	Share / Up to
			3	Bagian Umum Lt 2	20	10	Share / Up to
			4	Bagian Pembangunan Lt 3	20	10	Share / Up to
			5	Ruang Rapat Wako Lt 3	20	10	Share / Up to
			6	Aula dan Ruang SDM Lt 4	20	10	Share / Up to
			7	Roof top Lt 4	50	10	Share / Up to
8	CAMAT DUMAI TIMUR	1	1	Bendahara	20	10	Share / Up to
			2	Sekretariat	20	10	Share / Up to
9	DISNAKER	2	1	Ruang Sekretariat	20	10	Share / Up to
			2	Ruang Bendahara	20	10	Share / Up to
10	MEDIA CENTER	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
11	PENDOPO	1	1	Meja Mixer LT2	20	10	Share / Up to
12	PERLINDUNGAN ANAK	1	1	Sekretariat	10	10	Share / Up to
15	GUDANG OBAT RSUD	2	1	Gudang Obat	10	10	Share / Up to
			2	Lab	10	10	Share / Up to
16	BAPPENDA	4	1	Bendahara pengeluaran (Gedung Depan)	20	10	Share / Up to
			2	Bendahara pemasukan 1 (Gedung Belakang)	20	10	Share / Up to
			3	Bendahara pemasukan 2 (Gedung Belakang)	20	10	Share / Up to
			4	Ruang Server (Gedung Depan)	20	10	Share / Up to
			5	Ruang PBB (Gedung Depan)	20	10	Share / Up to
17	BKT.GELANGGANG	1	1	Gedung Perpustakaan	20	10	Share / Up to
			2	Panggung (Live streaming)	10	10	Share / Up to
18	BPBD	1	1	Sekretariat & Keuangan	20	10	Share / Up to
19	BTPM	2	1	Ruang Server	20	10	Share / Up to
			2	Ruang Bendahara	20	10	Share / Up to
20	DISKOMINFO	3	1	Ruang Sekretariat	30	10	Share / Up to
			2	Ruang Command Center	30	10	Share / Up to
			3	Ruang Bidang IKP	30	10	Share / Up to
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	1	Bagian Program	20	10	Share / Up to
			2	Bidang Kebersihan dan Taman	20	10	Share / Up to
22	KESBANGPOL	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
23	DINAS PARIWISATA	2	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
			2	UPT Bukit Gelanggang	20	10	Share / Up to
24	PUPR	3	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
			2	Bendahara	20	10	Share / Up to
			3	Lt 1	10	10	Share / Up to
25	SATPOL PP	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) 2021

			2	SIMPANG SOEBRANTAS	20	10	Share / Up to
26	UKM (SOEBRANTAS)	1	1	Bendahara	20	10	Share / Up to
			2	Ruang Belakang	20	10	Share / Up to
27	DAMKAR	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
28	CAMAT DUMAI BARAT	2	1	Bendahara	20	10	Share / Up to
			2	Sekretariat	20	10	Share / Up to
29	PERIKANAN	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
30	PERTANIAN	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
31	CAPIL	2	1	Ruang Aplikasi SIAK Kependudukan	30	10	Share / Up to
			2	Ruang Bendahara	20	10	Share / Up to
32	DINAS PENDIDIKAN	1	1	Ruang Server	30	10	Share / Up to
33	DINAS PERDAGANGAN	1	1	Ruang Sekretariat	20	10	Share / Up to
34	RSUD	1		Sekretariat Keuangan	30	10	Share / Up to
35	CAMAT DUMAI KOTA	2	1	Aula	20	10	Share / Up to
			2	Bendahara	20	10	Share / Up to
36	CAMAT DUMAI SELATAN	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
37	CAMAT MEDANG KAMPAI	1	1	Ruang Kependudukan	20	10	Share / Up to
38	CAMAT SEI 9	1	1	Ruang Bendahara	20	10	Share / Up to
39	DINSOS	1	1	Ruang Sekretariat	20	10	Share / Up to
40	KB	1	1	Sekretariat	20	10	Share / Up to
41	MASJID TAQWA	1	1	Sekretariat	10	10	Share / Up to
42	DISHUB	1	1	RUANG SERVER	40	10	Share / Up to
	CCTV LAMPU MERAH	5	1	SIMPANG BUNDRAN	30	0	Share / Up to
			3	SIMPANG BUMI AYU	30	0	Share / Up to
			4	SIMPANG SUKAJADI	30	0	Share / Up to
			5	LALIN CEMPEDAK	30	0	Share / Up to
43	KEC BUKIT KAPUR	1	1	Bendahara	20	10	Share / Up to
PUSKESMAS							
44	Puskesmas Medang Kampai	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
45	Puskesmas Bukit Kapur	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
46	Puskesmas Bumi Ayu	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
47	Puskesmas Dumai Kota	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
48	Puskesmas Dumai Barat	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
49	Puskesmas Jaya Mukti	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
50	Puskesmas Sei Sembilan	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
51	Puskesmas Bukit Timah	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
52	Puskesmas Medang Kampai	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
53	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1	1	Sekretariat	30	10	Share / Up to
KELURAHAN							
54	Bagan Besar	1	1	Sekretariat	10	10	Share / Up to
55	Bangsar Aceh	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
56	Bintan	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
57	Bukit Batrem	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
58	Bukit Datuk	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
59	Bukit Kayu Kapur	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
60	Buluh Kasap	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
61	Bumi Ayu	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
62	Dumai Kota	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
63	Guntung	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
64	Jaya Mukti	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to

65	Mundam	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
66	Pangkalan Sesai	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
67	Simpang Tetap Darul Ichsan	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
68	Sukajadi	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
69	Tanjung Palas	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
70	Teluk Binjai	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
71	Teluk Makmur	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
71	Purnama	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
72	Ratu Sima	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
73	Rimba Sekampung	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
74	Laksamana	1		Sekretariat	10	10	Share / Up to
75	PERKIM	1	1	Ruang Sekretariat	20	10	Share / Up to

3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina

Untuk target dari indikator sasaran ini yaitu 7 kelompok informasi masyarakat yang dibina. Sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan merupakan kegoatan yang mendukung pembinaan kelompok informasi masyarakat..

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu fungsi dari KIM adalah :

1. Sebagai Wahana Informasi
2. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.
3. Sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.
4. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi, yang dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :
 - * melalui informasi yang diperoleh berbagai sumber, KIM dapat menerapkan dalam berbagai aktifitas.
 - * anggota KIM dapat memperoleh peluang usaha dan dapat melakukan transaksi bisnis.

- * informasi yang diperoleh dikemas dalam bentuk bahan informasi yang dapat dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.

Tugas KIM sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lain;
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain untuk wujudkan kebersamaan, kesatuan persatuan bangsa.

Tabel Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Dumai Tahun 2021

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama KIM	Jenis Usaha
1	Bukit Kapur Bukit Kayu Kapur	Mataram wek-wek	Peternakan
2	Dumai Timur Jaya Mukti Tanjung Palas	Kesuma Tuah Negeri Karya Bersama Asyfa Albey Gaharu Swadaya	- Perkebunan Kelapa Sawit Keripik Nenas Keripik Nenas Repacking Madu Keripik Cabe, Teh Gaharu, Stik Kentang, dll Tali Kur, Tas Kulit, Kain sarung tenun
	Bukit Batrem	Jaya Bersama Tahu Surau Batrem Jaya Sejahtera	- - -
	Buluh Kasap		-
3	Dumai Kota Rimba Sekampung Dumai Kota Laksamana	Berkah Sekampung Maju Bersama Cahaya Laksamana	- - -
4	Dumai Barat Purnama	Purnama Lestari	-

	Bagan Keladi	Tuah Informasi	-
5	Sungai Sembilan Bangsal Aceh	Jambu Batu Usaha Bersama De Sista	Aneka Keripik Dodol Nenas

4. Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa.

Target dari indikator sasaran ini yaitu sebanyak 100% Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sebanyak 100% atau sebesar 100 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik.



Sub kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Layanan Hubungan Media yang dilaksanakan sampai dengan. Adapun indikator untuk sub kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan

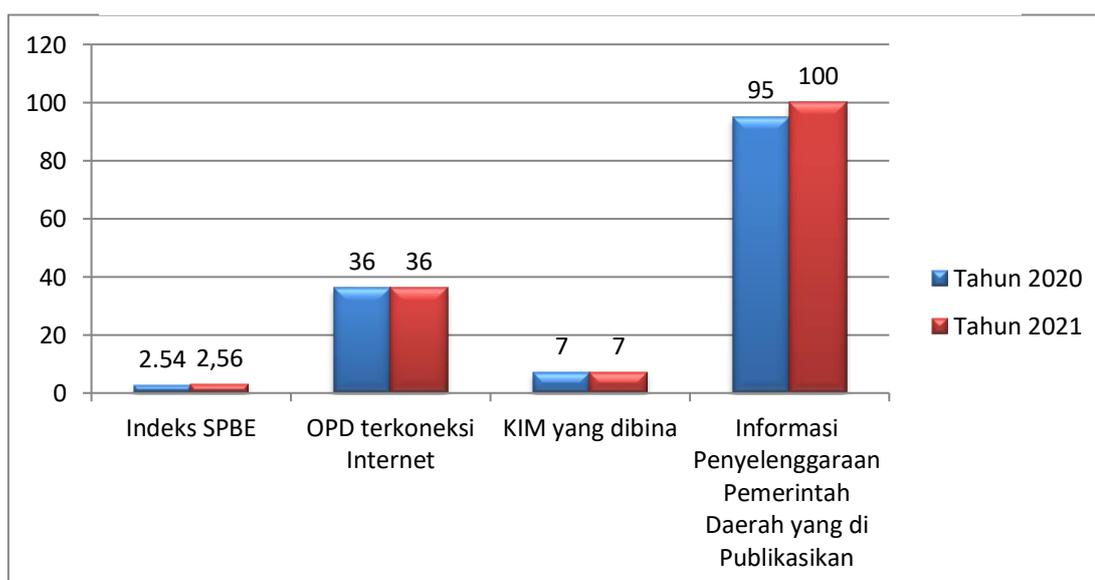
daerah. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai nomor 250 Tahun 2021, menunjuk sebanyak 95 (sembilan puluh lima) media setek dan elektronik menjadi mitra dalam penyebarluasan informasi pembangunan kota Dumai.



Perbandingan realisasi pencapaian indikator sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai pada tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2021 SEMESTER II	PERBANDINGAN CAPAIAN
Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks 2,54	Indeks 2.56	99,21 %
Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi ke jaringan internet	36 OPD	36 OPD	100%
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	7 KIM	7 KIM	100%
Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	95%	100%	105.26 %

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2020 dan 2021



Analisa penyebab keberhasilan dari indikator sasaran tersebut karena didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Terkait Permasalahan terhadap capaian indikator kinerja sasaran khususnya pada indikator Kategori e-government atau indeks SPBE Kota Dumai, dilihat dari penilaian mandiri yang dilakukan, terdapat sejumlah peningkatan pada kebijakan tata kelola SPBE, Kelembagaan dan teknologi informasi Komunikasi, namun masih terdapat kelemahan terkait dengan perencanaan strategis SPBE.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perencanaan strategis SPBE, penganggaran TIK, integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum berbagi pakai. Kebijakan pengelolaan SPBE dapat terwujud dengan baik didukung dengan perencanaan SPBE dan serta dukungan anggaran yang memadai. perencanaan SPBE ini nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penerapan SPBE di Kota Dumai.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan infomatika Kota Dumai pada tahun 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 11.942.532.217,-. Realisasi keuangan perprogram pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.662.391.009	5.352.232.964	96,54%
2	Informasi dan Komunikasi Publik	2.611.850.831	2.569.413.490	98,38%
3	Aplikasi Informatika	3.453.456.947	3.405.425.829	98,61%
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	136.816.449	118.981.769	86,96%
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	78.016.981	71.978.538	92,26%
		11.942.532.217	11.518.032.590	96,45%

Adapun realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 disampaikan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Pada Tahun 2021, jumlah anggaran sebesar Rp.5.662.391.009,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.5.352.232.964,- atau 96,54% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.46.717.950,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.43.916.057,- atau 94% dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.247.650,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.4.247.650,- atau sebesar 100 %;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.5.122.580,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.5.122.580,- atau sebesar 100 %;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.3.988.850,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.3.988.850,- atau sebesar 100 %;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.006.700,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.4.006.700,- atau sebesar 100 %;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.24.284.300,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.21.482.407,- atau sebesar 88,46 %;
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.5.067.600,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.5.067.600,- atau sebesar 100 %;

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.4.083.204.547,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.859.354.473,- atau 94,51% dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.001.863.147,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.3.783.089.673,- atau sebesar 94,53 %;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.38.238.850,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.35.446.300,- atau sebesar 92,70 %;
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.092.550,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 15.050.000,- atau sebesar 37.54 %;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.22.633.500,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.633.500,- atau 100% dengan sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.22.633.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.22.633.500,- atau sebesar 100 %;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.159.821.998,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.156.460.160,- atau 97,9% dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.45.102.750,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.44.770.000,- atau sebesar 99.26 %;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.46.716.048,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.46.715.160,- atau sebesar 99,99 %;
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.68.003.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.64.975.000,- atau sebesar 95,54 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 437.074.150,-, dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.401.317.042,- atau 91,81% dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.20.517.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.20.517.000,- atau sebesar 100 %;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.88.338.600,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.88.284.200,- atau sebesar 99,93 %;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.46.183.650,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.46.158.650,- atau sebesar 99,94 %;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.24.475.500,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.21.650.000,- atau sebesar 88,45 %;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.257.559.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.224.707.192,- atau sebesar 87,24 %;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.257.958.514,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.257.644.000,- atau 99,87% dengan sub kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.0,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 %;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.158.886.923,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.158.644.400,- atau sebesar 99,84 %;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.99.071.591,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.99.000.000,- atau sebesar 99,92 %;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp.432.044.350,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.392.444.732,- atau 90,83 % dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.996.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.600.000,- atau sebesar 60,24%;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.144.048.350,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.142.544.732,- atau sebesar 98,96 %;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.287.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 249.300.000,- atau sebesar 86,86 %;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp.222.936.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.218.463.000,- atau 97,99 % dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.105.650.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.104.110.000,- atau sebesar 98,54 %;

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.37.430.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.34.853.000,- atau sebesar 93,12 %;

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.79.856.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.79.500.000,- atau sebesar 99,55 %;

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pada Tahun 2021, jumlah anggaran sebesar Rp.2.611.850.831,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.569.413.490,- atau 98,38% melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp.2.611.850.831,-, dengan sub kegiatan :

a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.445.801.595,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.434.271.000,- atau sebesar 97,41 %;

b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.379.077.943,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.377.860.262,- atau sebesar 99,68 %;

c. Pelayanan Informasi Publik

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.85.602.023,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 85.226.064,- atau sebesar 99,56 %;

d. Layanan Hubungan Media

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.516.731.077,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.1.497.830.231,- atau sebesar 98,75 %;

e. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.45.517.076,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 40.887.933,- atau sebesar 89,83 %;

f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.139.121.117,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 133.338.000,- atau sebesar 95,84 %;

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Pada Tahun 2021, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.453.456.947,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.405.425.829,- atau 98,61 % melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.886.731.517,-, dengan sub kegiatan :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.49.582.275,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp48.660.431,- atau sebesar 98,14 %;

b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.2.837.149.242,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.2.822.901.145,- atau sebesar 99,50 %;

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 566.725.430,-, dengan sub kegiatan :

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.224.857.135,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.224.315.899,- atau sebesar 99,76 %;
- b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.142.882.850,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 128.320.058,- atau sebesar 89,81 %;
- c. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.46.925.450,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.45.425.000,- atau sebesar 96,80 %;
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.50.819.232,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 43.879.996,- atau sebesar 86,35 %;
- e. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.64.588.813,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 55.867.700,- atau sebesar 86,35 %;
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.36.651.860,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.55.867.700,- atau sebesar 86,50 %;

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Pada Tahun 2021, jumlah anggaran sebesar Rp.136.816.449,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.118.981.769,- atau 86,96 % melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 145.906.825-, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.80.588.807,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp.74.878.569,- atau sebesar 92,91 %;
 - b. Membangun Metadata Statistik Sektoral
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.56.227.642,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 44.103.200,- atau sebesar 78,44 %;

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pada Tahun 2021, jumlah anggaran sebesar Rp.78.016.981,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 71.978.538,- atau 92,26 % melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp.78.016.981.- dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.38.467.076,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 36.396.295,- atau sebesar 94,26 %;
 - b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.39.549.905,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasi sebesar Rp. 35.582.243,- atau sebesar 89,97 %;

BAB IV

PENUTUP

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan keberhasilan. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai adalah Pelayanan Publik belum seluruhnya berbasis elektronik dan terintegrasi; Terhadap kondisi tersebut, perlu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbasis elektronik dan terintegrasi.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dapat berjalan dengan baik perlu mendapat alokasi anggaran yang proporsional, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Dumai, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA DUMAI



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700511 199101 1 001

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)



PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 29 Maret 2021



H. PAISAL, SKM, MARS



Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si
NIP. 19700511 199101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	1 Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	2,81
		2 Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	36
		3 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7
		4 Presentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	100

Sasaran 6.3 : Meningkatkan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	<p>1. Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 2.330.458.122,00</p> <p>1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.330.458.122,00</p> <p>2. Program Aplikasi Informatika Rp. 3.480.826.610,00</p> <p>2.1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.886.815.800,00</p> <p>2.2 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 594.010.810,00</p> <p>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 145.906.825,00</p> <p>3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp. 145.906.825,00</p> <p>4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp. 87.130.175,00</p> <p>4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 87.130.175,00</p> <p align="right">Jumlah Rp. 6.044.321.732,00</p>
---	--


 PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 29 Maret 2021
 PIHAK PERTAMA

Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700511 199101 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	
				2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	1	Kategori e-Government Kota Dumai	Kategori	2,81
		2	Jumlah OPD yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	36
		3	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7
		4	Presentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	100

Dumai, Februari 2021

Plt. KEPALA

Drs. MHD FAUZAN

NIP. 19710423 199101 1 001

**RENCANA AKSI DARI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Pagu Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya Penguasaan Sistem Informasi Daerah	Kategori e-Government Kota Dumai	Kategori	2,81	6	7	8	9	10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	12 100%	13 5.325.438.178	14	15	16	17
		Jumlah OPD yang terkoneksi ke Jaringan Internet	OPD	36	8	8	8	8				46.717.950	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	4.247.650
		Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	7	-	-	7	-					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.122.850
		Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	100	20	20	40	20					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3.988.850
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	24.284.300
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	1	5.067.600
												34.033.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang terpelitir dan terdata kerja lapangan	85%	34.033.500
												163.046.798	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian kerja lapangan	9 stel	45.102.750
												504.263.138	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS dan Non PNS yang Mengikuti kursus, Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	69.944.048
													Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	12 orang	48.000.000
												386.319.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.994.850
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	110.532.100
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12 bulan	46.183.650
													Penyediaan Barang Cetak dan Cetak dan Pengandaian	Jumlah pengadaan barang cetak dan pengandaian	12 bulan	56.223.090
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 bulan	168.385.400
												403.412.141	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lainnya	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	1 unit	275.385.750
													Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan note book	2 unit	28.954.800
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan bangunan kantor lainnya	1 unit	99.071.591
												435.486.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi, benda pos lainnya	12 bulan	996.000
													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian air, listrik dan telepon	12 bulan	144.090.600

INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tahun 2017-2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI

No.	Indikator	Target			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Opd yang Terkoneksi Jaringan Internet (OPD)	-	-	24	32
2	Kategori E-Government Kota Dumai (Indeks)	-	-	2	2,50
3	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina (Kelompok)	-	-	5	7
4	Presentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa (Persentase)	-	-	90	95
					2021
					36
					2,81
					7
					100

Dumai, Januari 2020

Pt. KEPALA



Drs. MHD FAUZAN

NIP. 19710423 199101 1 001